

III. ASPEK EKONOMI

dalam Rekonstruksi Kelembagaan Sosial Penanganan dan Pencegahan Rawan Pangan dan Gizi Buruk

Dr. Handewi P. Rachman¹⁾ dan Lusi Fausia, M.Ec.²⁾

¹⁾*Ahli Peneliti Madya, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Departemen Pertanian*

²⁾*Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan, Institut Pertanian Bogor*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Hal ini terkait dengan komitmen negara sebagai salah satu penanda tangan kesepakatan dalam MDGs (*Millennium Development Goals*) yang sejalan dengan Deklarasi Roma dalam *World Food Summit* tahun 1996 yang menegaskan bahwa diharapkan dari 800 juta penduduk dunia yang kelaparan dapat dikurangi separuhnya pada tahun 2015.

Kebijaksanaan peningkatan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional berimplikasi bahwa pengkajian ketahanan pangan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan menjadi penting. Ketersediaan pangan di tingkat nasional yang cukup tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat wilayah (propinsi atau kabupaten) dan tingkat rumah tangga/individu. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya berbagai insiden gizi buruk dan busung lapar di beberapa daerah di Indonesia.

Ketahanan pangan di suatu wilayah mempunyai sifat multidimensional, yang ditentukan oleh berbagai faktor ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta melibatkan berbagai sektor dan pelaku yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, adalah penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk. Oleh karena itu upaya melakukan rekonstruksi kelembagaan sosial penanganan

dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk menjadi relevan untuk dilakukan.

2. Justifikasi

Departemen Pertanian (1999) telah menetapkan isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian dalam Kabinet Persatuan Nasional, dan komitmen ini dilanjutkan dalam Kabinet Gotong Royong maupun Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dengan harga terjangkau. Dalam hal ini ketahanan pangan mencakup komponen: (1) ketersediaan pangan, (2) distribusi dan konsumsi pangan, (3) penerimaan oleh masyarakat, (4) diversifikasi pangan, dan (5) keamanan pangan.

Sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional. Selain itu, ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Tanpa dukungan pangan yang cukup dan bermutu, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu, karena itu membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai makna politis yang negatif bagi penguasa. Bahkan di beberapa negara berkembang, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun demikian, tanggung jawab perwujudan ketahanan pangan tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan bagian tak terpisahkan dengan kebijakan dan program pemantapan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hal tersebut, adalah penting untuk melakukan rekonstruksi kelembagaan sosial penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan dalam menetapkan prioritas sasaran program intervensi pangan dan gizi untuk

mendukung ketahanan pangan suatu wilayah dan upaya menurunkan jumlah penduduk rawan pangan dan gizi buruk.

Mengingat pentingnya pangan dalam kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, isu-isu penting mengenai ketahanan pangan selalu dibahas dalam berbagai bagian integral pembangunan nasional dan dijadikan sebagai fokus utama kebijakan pembangunan pertanian. Sehubungan dengan peran strategis dari pangan tersebut maka secara historis telah dibentuk lembaga yang secara khusus menangani pangan nasional, yaitu BUKP (Badan Urusan Ketahanan Pangan) pada tahun 2000 dan tahun 2001 BBKP (Badan Bimas Ketahanan Pangan) serta BKP (Badan Ketahanan Pangan) pada tahun 2005 dibawah koordinasi Departemen Pertanian. Dengan dibentuknya lembaga yang secara fokus dan khusus menangani ketahanan pangan maka diharapkan dapat terbangun keterjaminan ketahanan pangan di tingkat nasional (makro dan mikro) sesuai dengan definisi dari ketahanan pangan itu sendiri yaitu terjaminnya pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas memadai, harga yang terjangkau bagi setiap orang pada setiap waktu yang dibutuhkan.

Ketahanan pangan meliputi aktivitas yang berhubungan dengan ketersediaan (*availability*) yang mencakup aspek produksi dan distribusi, aspek aksesibilitas (*accessability*) yang mencakup kemudahan untuk mendapatkannya baik dari segi fisik maupun daya beli serta mencakup stabilitas pengadaan (*stability*) yang sangat berhubungan dengan dimensi waktu. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan (*food security*), maka keterkaitan berbagai aspek yang dibangun secara fundamental harus dirancang baik dalam hal teknologi, sosial-budaya, politik dan juga aspek ekonomi.

Untuk aspek ekonomi, ketersediaan dan aksesibilitas menjadi target fokus dalam konteks ketahanan pangan dan dalam kaitannya dengan aspek tersebut berbagai peran kelembagaan ekonomi, baik dalam tataran pengambil kebijakan (pemerintah), swasta dan rumah tangga harus terbangun secara sinergi. Untuk itu, diskusi yang membahas mengenai peran aspek ekonomi dalam ketahanan pangan menjadi sangat relevan dilakukan dalam rangka "Rekonstruksi Kelembagaan Sosial Penanganan dan Pencegahan Rawan Pangan dan Gizi Buruk" di Indonesia.

3. Tujuan dan Keluaran

Berdasarkan latar belakang dan justifikasi seperti diuraikan di atas, diskusi kelompok kerja ini bertujuan untuk :

- (1) Mengidentifikasi kelembagaan ekonomi serta peluang-peluang kegiatan kewirausahaan di masyarakat yang berpotensi untuk melakukan penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.
- (2) Mengidentifikasi kegiatan dan peran masing-masing kelembagaan ekonomi dan kegiatan kewirausahaan yang telah teridentifikasi tersebut dalam melakukan penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.
- (3) Merumuskan mekanisme dan prosedur kerja dan keterkaitan kerjasama antara kelembagaan ekonomi dan kegiatan kewirausahaan masyarakat dengan lembaga pemerintah dalam penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.
- (4) Merumuskan saran dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.

Keluaran dari sidang kerja kelompok ini adalah :

- (1) Hasil identifikasi kelembagaan ekonomi dan peluang-peluang kegiatan kewirausahaan di masyarakat yang berpotensi untuk melakukan penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.
- (2) Hasil identifikasi kegiatan dan peran masing-masing kelembagaan ekonomi dan kegiatan kewirausahaan yang telah teridentifikasi tersebut dalam melakukan penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.
- (3) Rumusan mekanisme dan prosedur kerja dan keterkaitan kerjasama antara kelembagaan ekonomi dan kegiatan kewirausahaan masyarakat dengan lembaga pemerintah dalam penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.
- (4) Rumusan saran dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.

II. RUMUSAN HASIL SIDANG

1. Identifikasi Kelembagaan Ekonomi yang Potensial bagi Penanganan dan Pencegahan Rawan Pangan dan Gizi Buruk

Identifikasi kelembagaan ekonomi yang ada di masyarakat dan berpotensi untuk berperan serta dalam upaya penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk ternyata sangat bervariasi antar daerah, antar waktu, dan dengan bentuk serta jumlah yang sangat banyak. Padahal sesuai dengan fakta yang ada, rawan pangan dan gizi buruk dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Untuk itu, upaya penanganan dan pencegahannya juga sangat berbeda sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk tidak dapat dilakukan secara generik, tetapi perlu disesuaikan dengan faktor yang menyebabkan terjadinya rawan pangan dan gizi buruk tersebut.

Berdasar fakta seperti itu, maka peserta diskusi sepakat untuk melihat penanganan masalah rawan pangan dan gizi buruk ini dari sisi yang lain, yaitu bagaimana memberdayakan kelompok rumah tangga rawan pangan dan gizi buruk tersebut untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi agar mereka mampu menolong diri sendiri. Dalam hal demikian, diperlukan fasilitas dan dukungan yang kondusif dari masyarakat yang peduli (pentingnya menggalang solidaritas sosial) dan bantuan dari pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha (swasta). Beberapa syarat dan kondisi yang diperlukan dalam upaya memberdayakan kelompok rawan pangan dan gizi buruk tersebut adalah:

- (1) Pembentukan atau pemberdayaan kelembagaan (ekonomi) lokal tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan komunitas setempat.
- (2) Didukung dan sesuai dengan sumberdaya lokal yang ada.
- (3) Kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan industri pedesaan berbasis pada sumberdaya lokal merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh, namun demikian pengembangan tersebut harus bersifat lokal spesifik, dan tidak bersifat generik.
- (4) Untuk wilayah pedesaan bisa diterapkan pengembangan pola *family farming* yang bersifat lokal spesifik dengan mengembangkan komoditas unggulan daerah setempat yang potensial dan memiliki

prospek pasar baik. Sedangkan untuk daerah perkotaan dapat dikembangkan usaha-usaha di sektor informal.

2. Pendekatan Ekonomi dan Sosial dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan dan Gizi

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan dalam tataran makro, meso maupun mikro (rumah tangga), kompleksitas yang dihadapi di setiap daerah di Indonesia sangatlah beragam. Dengan memperhatikan kondisi ini, maka program yang bersifat generik akan sangat tidak efektif untuk diimplementasikan. Pendekatan dan kebijakan yang harus diterapkan dalam mewujudkan ketahanan pangan di setiap *region*/daerah seharusnya sangat memperhatikan aspek pasar dan juga sumberdaya ekonomi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ketahanan pangan di suatu daerah hanya akan dapat terwujud jika mekanisme pasar sudah berjalan dengan baik dimana infrastruktur kelembagaan, infrastruktur ekonomi, sarana dan prasarana mobilisasi berbagai komoditas sudah tersedia dengan cukup baik. Selain itu, insentif ekonomi agar kerawanan pangan dapat ditanggulangi juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang kebijakan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun rumah tangga.

Pendekatan ekonomi dan sosial dalam penanggulangan kerawanan pangan dan gizi hendaknya dilakukan secara menyeluruh, mencakup:

- (1) penetapan model pembangunan di tingkat makro yang pro pada pemerataan dan kesempatan kerja.
- (2) pemantapan persepsi pada tingkat makro, meso, dan mikro, tentang perlunya dibangun "*image*" yang disertai bukti-bukti empiris bahwa upaya mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi bukanlah hal yang konsumtif, namun merupakan "investasi jangka panjang".
- (3) meningkatkan apresiasi terhadap pangan lokal (rekayasa sosial)

2.1. Penetapan Model Pembangunan di Tingkat Makro yang Pro pada Pemerataan dan Kesempatan Kerja

Penetapan model pembangunan di tingkat makro hendaknya menggambarkan model-model pembangunan yang bukan hanya mengutamakan pertumbuhan, namun juga model pembangunan

yang lebih mengarahkan pada peluang kesempatan kerja yang lebih luas, terutama di daerah yang relatif rawan terhadap pangan. Model pembangunan yang dirancang secara komprehensif hendaknya memperhatikan potensi lokal yang dimiliki baik dari segi pasar maupun sumberdayanya. Dengan menciptakan model-model kegiatan ekonomi yang berbasis pada pasar dan potensi lokal tersebut diharapkan akan tercipta sektor-sektor produktif yang selain akan meningkatkan ketersediaan pangan namun juga dapat memperbaiki daya beli dari para pelaku ekonomi dan juga masyarakat luas lainnya. Untuk daerah rawan pangan di pedesaan, pengelolaan sumberdaya dengan konsep *family farming* adalah merupakan alternatif yang dapat ditawarkan. Selain itu pembangunan industri pedesaan yang berbasis pada sumberdaya lokal diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah selain juga mencegah terjadinya migrasi ke perkotaan. Untuk daerah *urban*, kesempatan, peningkatan dan pembenahan pada aktivitas sektor informal adalah alternatif solusi yang dapat ditawarkan guna meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangan.

Secara konkret, dalam kaitannya dengan rawan pangan dan ketahanan pangan, *sustainability* dari ketahanan pangan hanya akan terjaga jika kelembagaan masyarakat yang berperanpun dirancang sedemikian rupa sehingga lebih jelas lagi siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang menjalankan apa. Kewirausahaan ekonomi daerah, sebagai salah satu alternatif penyokong ekonomi daerah, hanya akan berjalan dengan baik di suatu wilayah/*region* jika secara jelas dapat menciptakan *networking* yang cukup kuat antara UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan perusahaan-perusahaan lebih besar lainnya.

Dalam konteks ekonomi wilayah, perusahaan besar sebetulnya memiliki *responsibility* terhadap pengembangan usaha-usaha kecil terkait. Selain dari *networking* atau *partnership* yang dibangun antara UKM-UKM dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, bentuk-bentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) juga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ekonomi daerah, sebagai contoh adalah berkembangnya Dasa Wisma-Dasa Wisma dimana aktivitasnya bukan hanya dalam aspek sosial namun juga kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah pedesaan. Kelembagaan

ekonomi di tingkat masyarakat akan lebih terjaga kesinambungannya jika juga berbasiskan pada pasar dan sumberdaya ekonomi lokal atau mengandung kearifan lokal yang secara turun temurun telah diakui eksistensinya.

2.2. Pemantapan Persepsi pada Tingkat Makro, Meso, dan Mikro: Pengatasan Masalah Kerawanan Pangan dan Gizi Merupakan “Investasi Jangka Panjang”

Salah satu permasalahan yang sering ditemui pada penentuan berbagai program dan kebijakan adalah adanya pengertian tentang *quick yielding* dari berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan yang umumnya terkait dengan masa kekuasaan (4 tahun). Dalam kaitannya dengan menghindari dan menanggulangi rawan pangan dan gizi buruk, sangatlah tidak relevan jika hasil dari kebijakan terkait dapat terukur dalam jangka pendek. Perlu ditekankan pentingnya pengertian dan pemahaman yang sama dari setiap biaya yang dikeluarkan dalam penanganan masalah rawan pangan dan gizi buruk adalah merupakan aktivitas investasi pada setiap tataran pengambil kebijakan makro, meso dan mikro. Merubah persepsi ekonomi dari *cost* menjadi *investment* perlu dilakukan baik pada pemerintah, *private* maupun komunitas.

Secara operasional, kelembagaan ekonomi generik yang dapat berperan dalam ketahanan pangan nasional, regional maupun rumah tangga adalah pemerintah/pemda, komunitas (NGO, dll), serta rumah tangga dan perorangan. Ketiga kelompok lembaga tersebut dapat dikategorikan sebagai lembaga yang berperan sebagai lembaga ekonomi dan harus dipahami oleh ketiga kelompok lembaga ekonomi tersebut adalah bahwa ketahanan pangan yang diarahkan pada pencegahan gizi buruk bukanlah hanya sekedar “biaya” namun lebih bersifat aktivitas investasi. Insentif ekonomi yang dapat dihasilkan dari investasi ini hanya dapat diketahui dengan memperhitungkan *gain and losses* yang dihasilkan dari suatu kondisi gizi buruk sebagai akibat dari rawan di suatu daerah. Dengan mengetahui dan mengerti secara pasti tentang kerugian yang akan dihadapi jika rawan pangan dan gizi buruk ini terjadi, maka diharapkan biaya apapun dan berapa besar dari biaya tersebut yang dikeluarkan saat ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang positif pada masa yang akan datang.

Investasi yang dikeluarkan untuk rawan pangan dan gizi buruk adalah investasi jangka panjang karena berhubungan langsung dengan kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan hal ini maka merubah persepsi ekonomi dari biaya menjadi investasi adalah hal yang harus dilakukan dan dimengerti bagi setiap lembaga yang terkait, termasuk masyarakat luas dan tingkat rumah tangga. Gambaran tentang besar kerugian negara akibat terjadinya gizi buruk (dan rawan pangan) dapat disimak pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kerugian Ekonomi sebagai Masalah Gizi antara Indonesia dengan Beberapa Negara Berkembang Lainnya, Tahun 1991

Negara	Bayi lahir hidup per tahun (juta)	GNP per kapita (USD)	Prev. Gizi Kurang (%)	Potensi Produktivitas (USD)	Kerugian km Gizi Kurang (juta USD per thn)	GNP yg hilang thn 1991 (%)	Biaya kesehatan (Juta USD per thn)
Tanzania	1,2	100	20	1.825	427	17	109
Kenya	1,1	340	20	6.206	1.377	16	375
Brazil	4,0	2.940	13	53.669	28.187	6	19.871
Meksiko	2,4	3.030	14	55.312	18.430	7	7.648
Indonesia	4,6	610	14	11.135	7.156	6	2.148
Filipina	1,8	730	19	13.326	4.507	10	883
Thailand	1,2	1.570	26	28.66	8.942	10	4.061
Malaysia	0,6	2.520	24	46.002	6.072	13	1.259

Sumber : Konig (1995)

Guna meningkatkan peran ekonomi dalam mencapai *sustainability* ketahanan pangan di suatu daerah maka perlu dikembangkan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi yang secara langsung ditujukan kepada kelompok sasaran, dengan prinsip/pendekatan sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan dan memperkuat kemitraan pemerintah-swasta-NGO-masyarakat sasaran (*public-private partnership*).
- (2) Menggali, mengembangkan dan memperkuat sumberdaya lokal (pangan dan non pangan) dalam aktivitas ekonomi, dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik desa-kota, agro-ekosistem, budaya, dsb.

2.3. Rekayasa Sosial untuk Meningkatkan Apresiasi terhadap Pangan Lokal

Pasar dan sumberdaya dapat secara sinergis menghasilkan sesuatu yang kemudian dapat dikonsumsi atau diutilisasi oleh semua pihak, termasuk masyarakat didalamnya. Persaingan antara berbagai produk yang dihasilkan dari luar daerah (luar negeri) dan dipasarkan pada pasar domestik dapat mengakibatkan berbagai gejala dalam eksistensinya. Untuk hal ini berbagai kiat seyogyanya dilakukan, baik yang bersifat teknis, ekonomi maupun sosial. Sinergisme dari berbagai aspek tersebut sangat menentukan kesinambungan kondisi ketahanan pangan disuatu daerah. Untuk rekayasa teknis, berbagai kemampuan untuk meningkatkan produksi dan juga menciptakan nilai tambah produk merupakan hal yang seharusnya dapat dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Untuk ekonomi, berbagai bukti-bukti empiris yang menggambarkan *gain* yang diperoleh dari berbagai investasi yang mengarah pada peningkatan produktivitas, peningkatan kesehatan dll merupakan hal yang secara pasti harus dilakukan. Untuk aspek sosial, saat ini yang perlu juga dilakukan adalah bagaimana meningkatkan apresiasi terhadap produk lokal. Dalam kaitannya dengan persaingan, maka berbagai kebijakan yang mengarah pada apresiasi dan peningkatan konsumsi pangan lokal perlu dilakukan.

Selain dari segi program-program peningkatan konsumsi produk lokal, aspek edukasi tentang gizi di masyarakat juga perlu dilakukan. Reaktivasi dan revitalisasi kembali lembaga-lembaga seperti Posyandu, pemanfaatan lahan pekarangan dll, tampaknya dapat dilakukan kembali, tentunya dengan penyempurnaan-penyempurnaan program dan pemanfaatannya. Pemanfaatan lembaga semacam Posyandu hendaknya tidak lagi hanya ditujukan pada aktivitas perempuan namun juga pada keluarga secara keseluruhan.

3. Kebijakan Makro yang Kondusif: Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan adalah bahwa upaya penanganan rawan pangan dan gizi buruk seperti di atas dapat berhasil hanya apabila didukung oleh kebijaksanaan makro yang kondusif. Untuk itu direkomendasikan untuk:

- (1) Menerapkan model pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya mengejar tingginya pertumbuhan ekonomi semata namun lebih mengedepankan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha.
- (2) Program bantuan pangan (seperti RASKIN) bagi kelompok rawan pangan dan gizi buruk tetap diperlukan. Peran pemerintah daerah dalam pengadaan dan penyaluran bantuan pangan sangat diperlukan. Bantuan pangan disarankan tidak hanya dalam bentuk beras, tetapi pangan yang sesuai dengan potensi wilayah dan pola konsumsi pangan pokok penduduk setempat. Pengadaan pangan untuk bantuan tersebut perlu dikaitkan dengan upaya penyerapan pasar hasil produksi pangan wilayah setempat.
- (3) Perlu pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya penanganan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk. Pemerintah pusat diharapkan berperan dalam perumusan kebijakan dan program serta alokasi sumberdaya pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai bertanggung jawab terhadap implementasi/pelaksanaan program, sedangkan pemerintah propinsi bertanggung jawab terhadap distribusi dan monitoring dari pelaksanaan program penanganan rawan pangan dan gizi yang telah ditetapkan.
- (4) Bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dievaluasi kembali pelaksanaannya karena hal ini dipandang kurang mendidik kemandirian dan dalam jangka panjang dikhawatirkan menciptakan ketergantungan kelompok penerima tersebut terhadap bantuan. Pengalokasian anggaran tersebut pada kegiatan produktif yang melibatkan kelompok rumah tangga rawan pangan (misalnya dalam bentuk padat karya, *food for work*) merupakan salah satu pilihan yang dapat ditempuh. Penciptaan kegiatan produktif akan mendorong kegiatan perekonomian di daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan bagi kelompok rawan pangan dan

pada gilirannya dapat meningkatkan akses terhadap pangan dan meningkatkan ketahanan pangan mereka.

SUMBER PUSTAKA

Konig. 1995. The Cost of Malnutrition, Technical Support Group, F. Hoffmann-La Roche Ltd. Edisi 4/0895 : 02 No 50628.